
PEMODELAN PROSES BISNIS SISTEM INFORMASI ANALISIS APBD DENGAN BUSINESS PROCESS MODELLING NOTATION (BPMN)

Assistriadi Widjisen¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kahuripan Kediri
Jalan Soekarno-Hatta No.1 Pelem Pare Kediri 64121, Telp/Fax: (0354) 391977
assistriadi@kahuripan.ac.id

Abstrak

Sistem Informasi Analisis APBD adalah aplikasi yang memfasilitasi proses digitalisasi data anggaran pada dokumen APBD sehingga menghasilkan basis data berdasarkan tahun anggaran, kota/kabupaten, SKPD, program, kegiatan, rekening dan nominal anggaran. Selanjutnya mengolahnya menjadi informasi atau pengetahuan dan visualisasi outputnya dalam bentuk tabel dan grafik analisa komposisi, klasterisasi, distribusi, rekapitulasi dan komparasi proporsi alokasi anggaran berdasarkan tahun anggaran, kota/kabupaten, organisasi, akun pendapatan, akun belanja, akun pembiayaan, akun program, akun kegiatan serta akun rekening. Sedangkan dalam perancangannya diperlukan identifikasi proses bisnis dalam bentuk use case diagram dan pemodelan proses bisnis dengan menggunakan Business Process Modeling Notation (BPMN). Adapun hasil penelitian ini adalah menghasilkan proses inti yang terdiri dari 3 buah pool yaitu pool persiapan, pool analisis dan pool pengesahan dengan lane yang berisikan 6 partisipan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat. Selanjutnya pada pool persiapan terdapat 6 milestone yang terdiri dari rancangan APBD, update sistem, entry data, verifikasi data dan koreksi data dan pada pool analisis terdapat 6 milestone yang terdiri dari update indikator, update regulasi, update demografi, analisis anggaran, laporan analisis serta pada pool pengesahan terdapat 6 milestone yang terdiri dari pembahasan, persetujuan, pengesahan, sosialisasi dan integrasi data APBD.

Kata kunci: Sistem Informasi, APBD, Proses Bisnis, Pemodelan, BPMN

Abstract

APBD Analysis Information System is an application that facilitates the process of digitizing budget data in Local Government District Annual Budget documents so as to produce a database based on of the fiscal year, city / district, SKPD, programs, activities, accounts and nominal budget. Then process it into information or knowledge and visualize the output in the form of tables and graphs of composition analysis, clustering, distribution, recapitulation and comparison of the proportion of budget allocation based on fiscal year, city / district, organization, revenue account, expenditure account, financing account, program account, account activity and account code. Whereas in the design it is necessary to identify business processes in the form of use case diagrams and business process modeling using Business Process Modeling Notation (BPMN). The results of this study are to produce a core process consisting of 3 pools, namely the preparation pool, the analysis pool and the validation pool with lanes containing 6 participants, namely the regional head, regional secretary, information system operator, APBD consultant, DPRD member and citizen. Furthermore, in the preparation pool there were 6 milestones consisting of the draft APBD, system updates, data entry, data verification and data correction and in the pool of analysis there were 6 milestones consisting of indicator updates, regulatory updates, demographic updates, budget analysis, analysis reports and on pool of approval there are 6 milestones consisting of discussions, approvals, endorsements, socialization and integration of APBD data.

Keywords: *Information Systems, APBD, Business process, Modeling, BPMN*

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah[1][2]. Adapun konsep dasar APBD dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ini adalah merupakan mandat politik warga (Citizen Political Mandate) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas pengelolaan anggaran[3][4]. Sehingga APBD merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah yang harus dikelola berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga masyarakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat[5].

Sebagai sebuah anggaran publik yang melalui proses teknokrasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi, maka dalam proses perencanaan, pembahasan dan penetapan kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sudah dapat dipastikan akan melibatkan aktivitas teknis dan politis. Oleh sebab itu dikenal dengan istilah “Politik Anggaran” yang mengandung pengertian bahwa politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan alokasi anggaran di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia[6]. Termasuk diantaranya adalah bagaimana anggaran publik ini didapatkan, dikelola dan didistribusikan, pihak mana saja yang akan diuntungkan ataupun dirugikan[7]. Dalam praktiknya, anggaran tak terlepas dari sejumlah kepentingan yang harus diakomodasi, sekaligus menjadi mediasi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks demikian, kebutuhan atau kepentingan itu seringkali memiliki bobot prioritas yang relatif sama. Dari sanalah diperlukan pilihan-pilihan memutuskan mana yang akan didanai terlebih dahulu. Tidak heran jika atas pertimbangan itu pada akhirnya berbagai pihak dan kelompok kepentingan akan berebut pengaruh di dalam memutuskan alokasi anggaran. Itulah yang disebut dengan anggaran sebagai medan tempur strategis dalam politik kebijakan pembangunan.

Mengingat proses politik anggaran ini cukup signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan anggaran, maka pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) perlu berperan untuk mengendalikan politik anggaran di daerahnya[8]. Dengan caranya untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran. Itulah sebabnya, prioritas pembangunan menjadi hal penting. Dan pada akhirnya upaya membangun di sektor manapun juga tujuan akhirnya harus bisa meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun manusia menuju kesejahteraan rakyat. serta sebagai syarat utama agar mencapai keberhasilan, maka politik anggaran harus dibarengi dengan koordinasi intensif antar kementerian, antar lembaga, dan antar pusat dan daerah serta partisipasi dan pengawasan oleh warga masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah literasi anggaran daerah (APBD) dengan memanfaatkan teknologi informasi[9][10][11]. Yang mana transparansi informasi dan akses warga masyarakat terhadap anggaran publik menjadi lebih mudah sehingga mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel [12][13][14][15][16].

Sedangkan urgensi pengembangan daripada Sistem Informasi Analisis APBD ini adalah muncul permasalahan pada saat melakukan analisa untuk menentukan besarnya proporsi alokasi anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan akan hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat

pada dokumen APBD Kota/Kabupaten adalah besarnya jumlah data dan informasi yang harus diolah, kompleksitas struktur data anggaran serta format penyajian informasi alokasi dan distribusi anggaran yang terbatas[17][18][19]. Oleh sebab itu diperlukan dukungan teknologi informasi sebagai solusinya, yang mana teknologi informasi ini telah teruji memiliki kapabilitas dan reliabilitas dalam mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, cepat, dan beragam [20].

Pada tahap awal perencanaan dan perancangan sebuah sistem informasi secara umum akan dilakukan analisis, identifikasi dan valuasi terhadap tiga elemen permintaan sistem, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bisnis sistem informasi yang menjelaskan mengapa sebuah sistem informasi harus dibangun dan yang kedua adalah persyaratan bisnis sistem informasi yang menggambarkan apa saja yang akan dapat dilakukan oleh sebuah sistem informasi serta yang ketiga adalah nilai bisnis sistem informasi yang menguraikan manfaat yang akan diperoleh oleh organisasi atau sebuah institusi ketika telah berhasil mengaplikasikan sistem informasi yang direncanakannya[21][22].

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi proses bisnis daripada sebuah sistem informasi, yang mana proses bisnis ini diartikan sebagai sebuah rangkaian relasi dan terstruktur daripada aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan sebuah layanan spesifik atau menghasilkan produk untuk pengguna tertentu[23]. Selain itu juga proses bisnis dapat dimaknai sebagai sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan pengertian daripada aktivitas, adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu proses bisnis. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing bagian atau aktor-aktor yang terlibat dalam operasionalisasi daripada sebuah sistem informasi. Selain itu identifikasi proses bisnis ini juga bermuara pada pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions) dan pembuatan atau perbaikan standar operating procedure (SOP)[24].

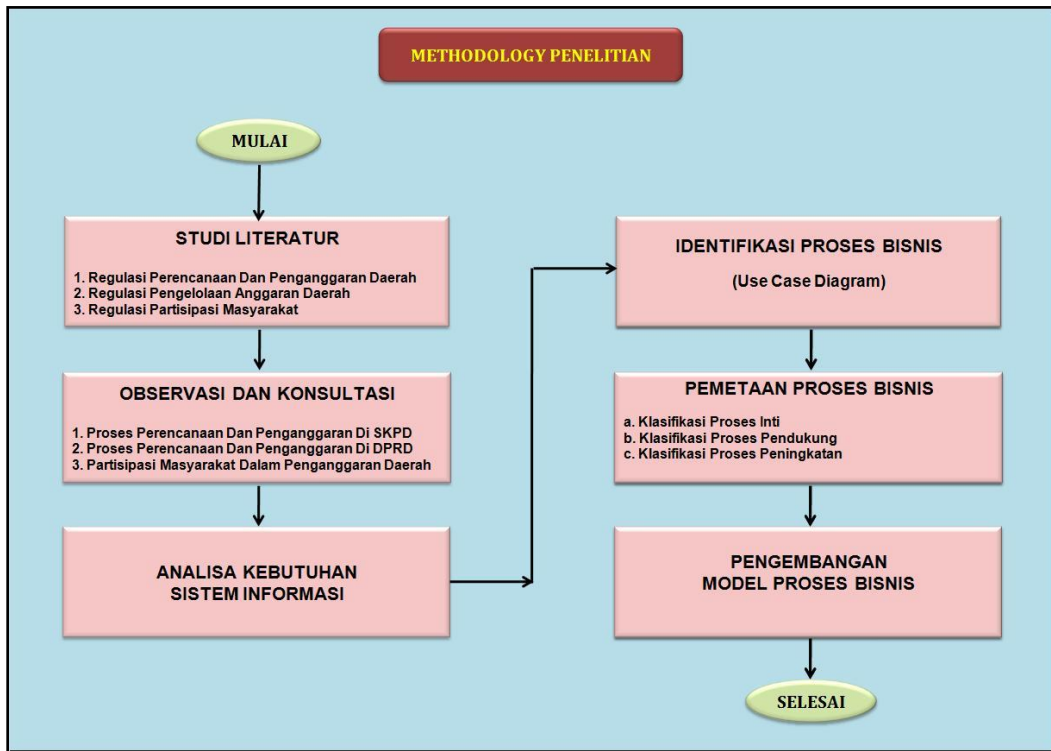
Kemudian untuk menggambarkan dan mendokumentasikan proses bisnis diatas agar mudah difahami dan dijelaskan, maka diperlukan pemodelan proses bisnis yang merupakan sebuah model daripada proses bisnis yang mendefinisikan alur, cara, aktivitas dan partisipan dalam berinteraksi dan beroperasi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dari suatu organisasi atau yang menghasilkan keluaran atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun pemilihan pemodelan grafisnya adalah menggunakan BPMN (Business Process Modeling Notation) sebagai notasi untuk pemodelan proses bisnisnya[25]. Sedangkan alasan utama pemilihan pemodelan berdasarkan BPMN ini adalah karena BPMN memberikan kemudahan dalam membuat notasi grafis yang dapat menggambarkan secara logis langkah-langkah dalam proses bisnis serta BPMN dirancang untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang menghubungkan antar partisipan dari masing-masing aktivitas yang berbeda [26][27].

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahan adalah belum dikembangkannya sebuah model proses bisnis pada sistem informasi analisis APBD dengan menggunakan kaidah BPMN (Business Process Modeling Notation), sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah identifikasi proses bisnis dalam bentuk USE CASE DIAGRAM, bagaimanakah klasifikasi proses inti (core process) dan proses pendukung (supporting process), dan bagaimanakah pemodelan proses bisnis dalam bentuk pool dan milestones.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 tahapan, yang mana tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut :

- a) **STUDI LITERATUR** : pada tahap ini bertujuan untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan kritis terhadap kewenangan, kewajiban dan larangan berdasarkan regulasi proses perencanaan dan penganggaran daerah dan partisipasi masyarakat, kemudian melakukan kajian terhadap indikator kesejahteraan daerah yang meliputi indikator kemiskinan menurut kabupaten/kota, indikator ketenagakerjaan menurut kabupaten/kota, indikator kesehatan menurut kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten/kota.
- b) **OBSERVASI DAN KONSULTASI** : pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pola interaksi, mekanisme, kedudukan dan peran dalam proses penganggaran daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif dan warga masyarakat
- c) **FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)** : pada tahap ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem informasi dan untuk dapat menangkap kasus penggunaan sebuah system informasi dari sudut pandang fungsional maka diperlukan sebuah narasi atau cerita dalam bentuk sebuah skenario. Dimana dalam skenario ini dapat memberikan pemahaman mengenai alasan mengapa permasalahan yang hendak diselesaikan tersebut layak dan penting untuk dibuatkan sebuah system informasinya, serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk mengeksplorasi perancangan sebuah system informasi.
- d) **FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)** : pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis dalam bentuk rangkaian sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran, layanan spesifik atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun aktivitas yang perlu untuk diidentifikasi adalah aktivitas operasional yang meliputi saat terjadinya penyediaan barang atau jasa kepada pengguna, selanjutnya adalah aktivitas informasi yaitu aktivitas pada saat terjadinya proses pendataan, pengolahan data hingga penyajian informasi dan aktivitas pengambilan keputusan yaitu interaksi antar aktor yang mengharuskan untuk melakukan uji verifikasi, uji validasi atau dalam bentuk persetujuan atau kompromi.
- e) **FOCUSED GROUP DISCUSSION (FGD)** : Pemetaan dan analisis proses bisnis biasanya dimulai dari suatu analisis kebutuhan dengan cara memahami visi, misi, tugas dan fungsi organisasi dan pihak-pihak eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari organisasi. Sedangkan tujuan pemetaan dan analisis proses bisnis adalah untuk melihat secara utuh keseluruhan rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian organisasi dalam melayani pemangku kepentingan utama, baik eksternal maupun internal. Disamping itu tahapan ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana aktivitas yang terjadi, siapa saja yang terlibat dan berperan sebagai apa serta sumber daya apa saja yang diperlukannya
- f) **PENGEMBANGAN MODEL PROSES BISNIS** : pada tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan alur, cara, aktivitas, urutan proses dan pesan yang menghubungkan antar partisipan dari masing-masing aktivitas yang berbeda dengan menggunakan BPMN (Business Process Modeling Notation).

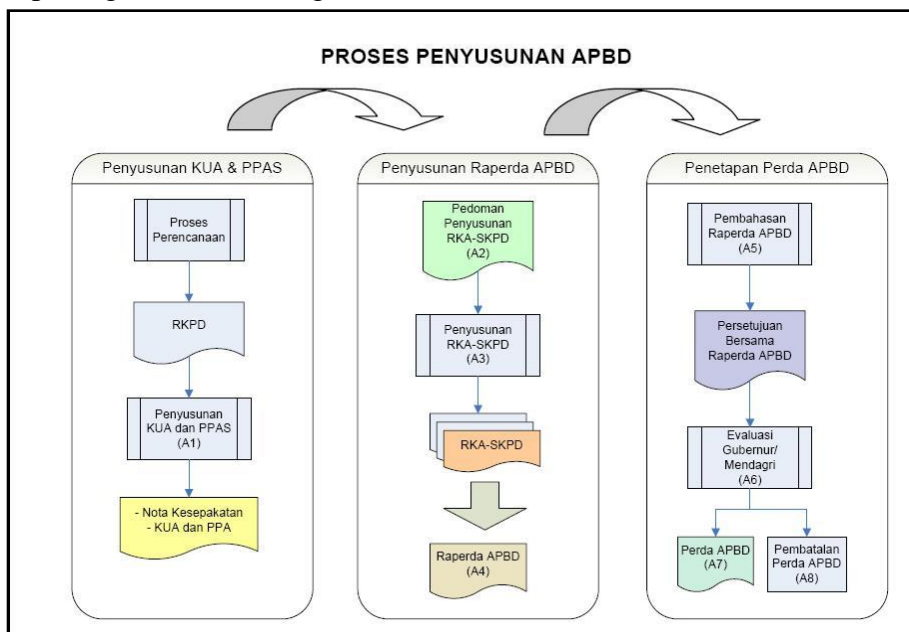


Gambar 1 Methodologi Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Proses Penyusunan APBD

Setelah melakukan studi literatur, observasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, maka proses penyusunan APBD Kota/Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



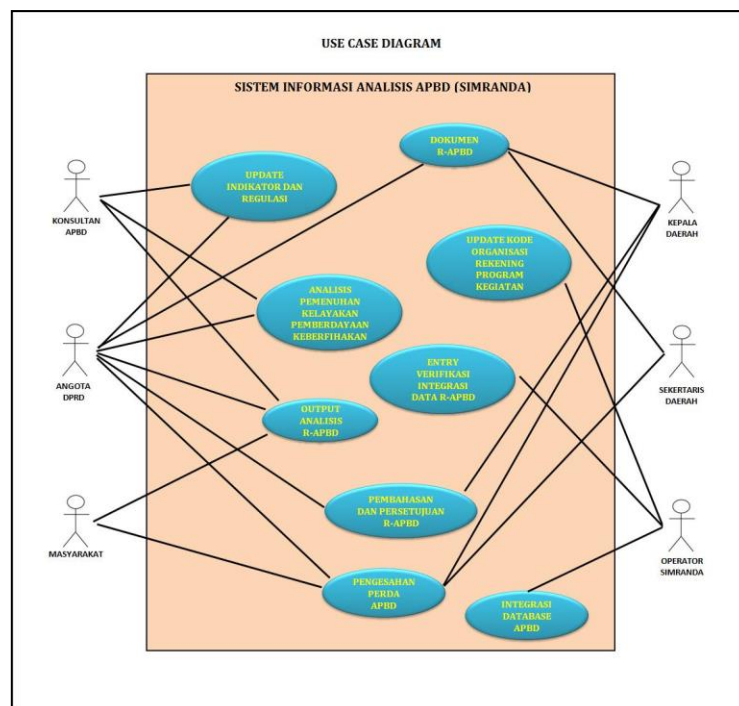
Gambar 2 Proses Penyusunan APBD

2) Identifikasi Proses Bisnis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka proses bisnis sistem informasi analisis APBD ini teridentifikasi 6 aktor atau partisipan yang terlibat yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat. Dimana masing aktor melakukan aktivitas sebagai berikut :

- 1) Kepala Daerah melakukan aktivitas pengajuan dokumen Rancangan-APBD kepada anggota DPRD, dan memerintahkan sekretaris daerah untuk memfasilitasinya. Dan bersama dengan DPRD untuk menghasilkan persetujuan R-APBD, serta pengesahan R-APBD menjadi Perda APBD.
- 2) Sekretaris Daerah melakukan aktivitas pengajuan dokumen Rancangan-APBD kepada anggota DPRD, selanjutnya sekretaris daerah memerintahkan kepada setiap kepala SKPD untuk melakukan pembahasan alokasi anggaran berdasarkan tugas, dan fungsi.
- 3) Anggota DPRD melakukan aktivitas untuk membahas dan memberikan persetujuan atau menolak dan menetapkan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah untuk menjadi Perda APBD.
- 4) Konsultan APBD melakukan aktivitas membantu anggota DPRD dalam melakukan kajian yang mendalam dan kritis terhadap kewenangan, kewajiban dan larangan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dan kajian terhadap pencapaian indikator kesejahteraan daerah.
- 5) Operator Sistem Informasi Analisis APBD melakukan aktivitas mengupdate nomenklatur kode organisasi, kode rekening, kode program, kode kegiatan dan entry, verifikasi, validasi dan integrasi data anggaran APBD.
- 6) Masyarakat melakukan aktivitas mengakses hasil analisis R-APBD dan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas R-APBD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan use case diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Use Case Diagram

3) Pemetaan Proses Bisnis

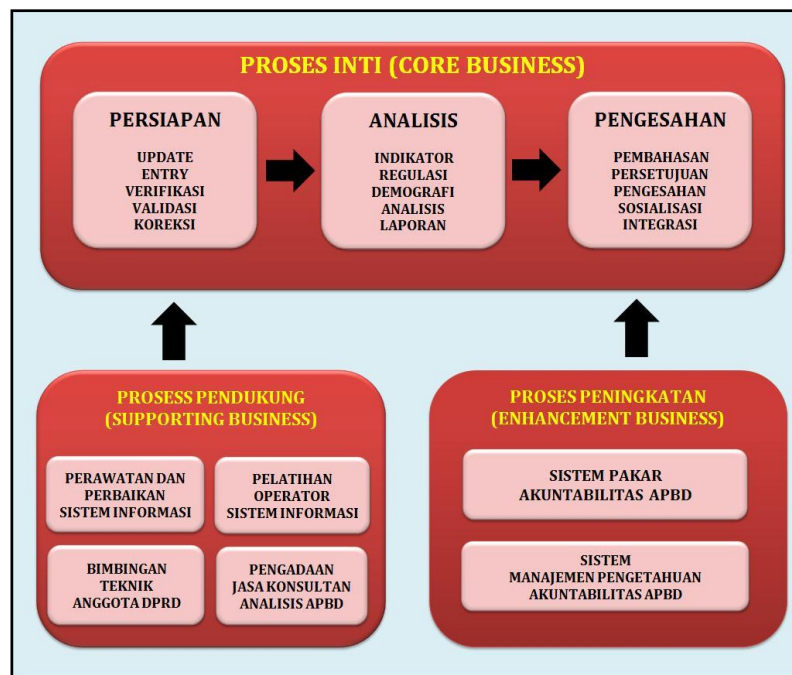
Selanjutnya untuk melihat secara utuh keseluruhan rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian sistem informasi analisis APBD dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama, baik eksternal maupun internal. Maka diperlukan analisis dan pemetaan dengan mengklasifikasikan menjadi 2 tipe utama yaitu Proses Inti (Core Process) dan Proses Pendukung (Supporting Process). Dimana pengertian daripada Proses Inti (Core Process) adalah proses yang memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut

1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal
2. Secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi
3. Memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Sedangkan Proses Pendukung (Supporting Process) adalah proses yang memenuhi kriteria berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses inti
2. Tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.

Sehingga berdasarkan pengertian diatas maka pemetaan proses bisnis sistem informasi analisis APBD ini dapat dipetakan dan digambarkan sebagai berikut :



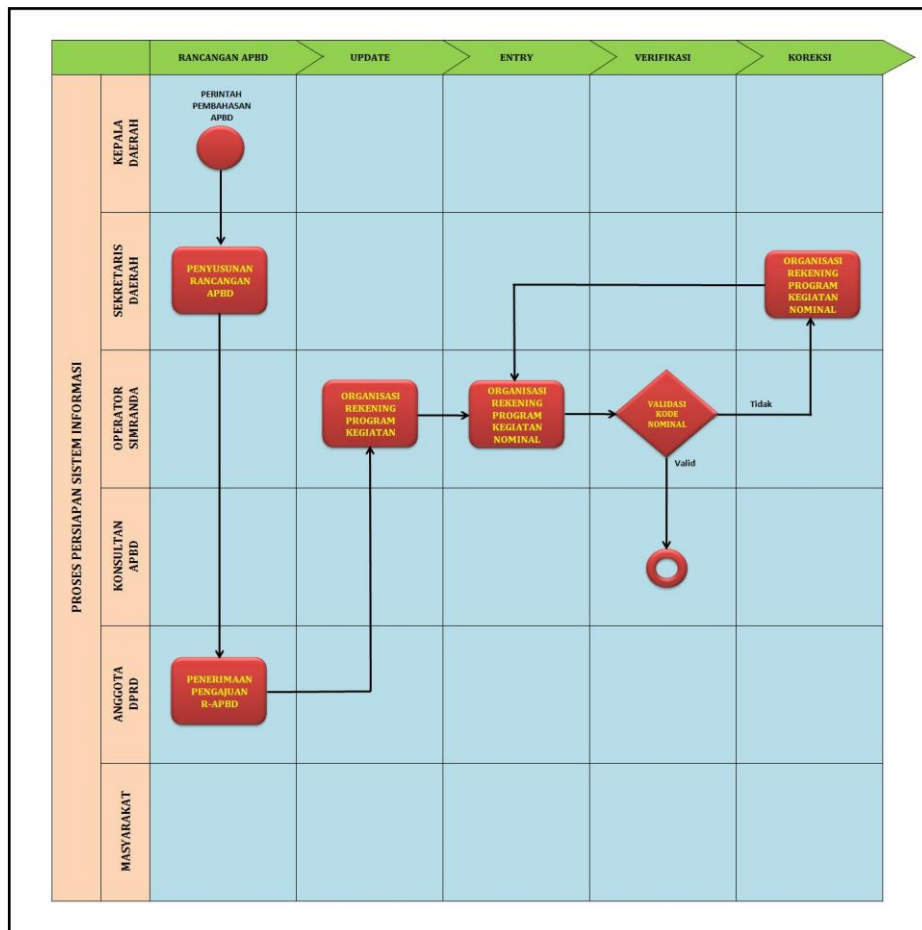
Gambar 4 Pemetaan Proses Bisnis

- 1) Pada bagian persiapan berisikan berbagai bentuk aktivitas yang ditujukan untuk mempersiapkan sistem informasi analisis APBD agar dapat digunakan untuk melakukan analisis anggaran.
- 2) Pada bagian proses pendukung diantaranya adalah komponen perawatan dan perbaikan sistem informasi analisis APBD, komponen pelatihan operator sistem informasi analisis APBD, komponen bimbingan teknik anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran daerah, serta komponen pengadaan jasa konsultan analisis APBD.
- 3) Pada bagian proses peningkatan terdapat 2 komponen peningkatan yaitu sistem pakar akuntabilitas APBD dan sistem manajemen pengetahuan akuntabilitas APBD.

4) Pemodelan Proses Bisnis

Selanjutnya pemodelan proses bisnis sistem informasi analisis APBD ini dituangkan dengan menggunakan notasi BPMN (Business Process Modeling Notation). Dan sesuai dengan proses inti yang sudah dihasilkan pada pemetaan proses bisnis sebelumnya, maka pemodelan proses bisnis ini juga terbagi menjadi 3 model, adapun pemodelannya adalah sebagai berikut :

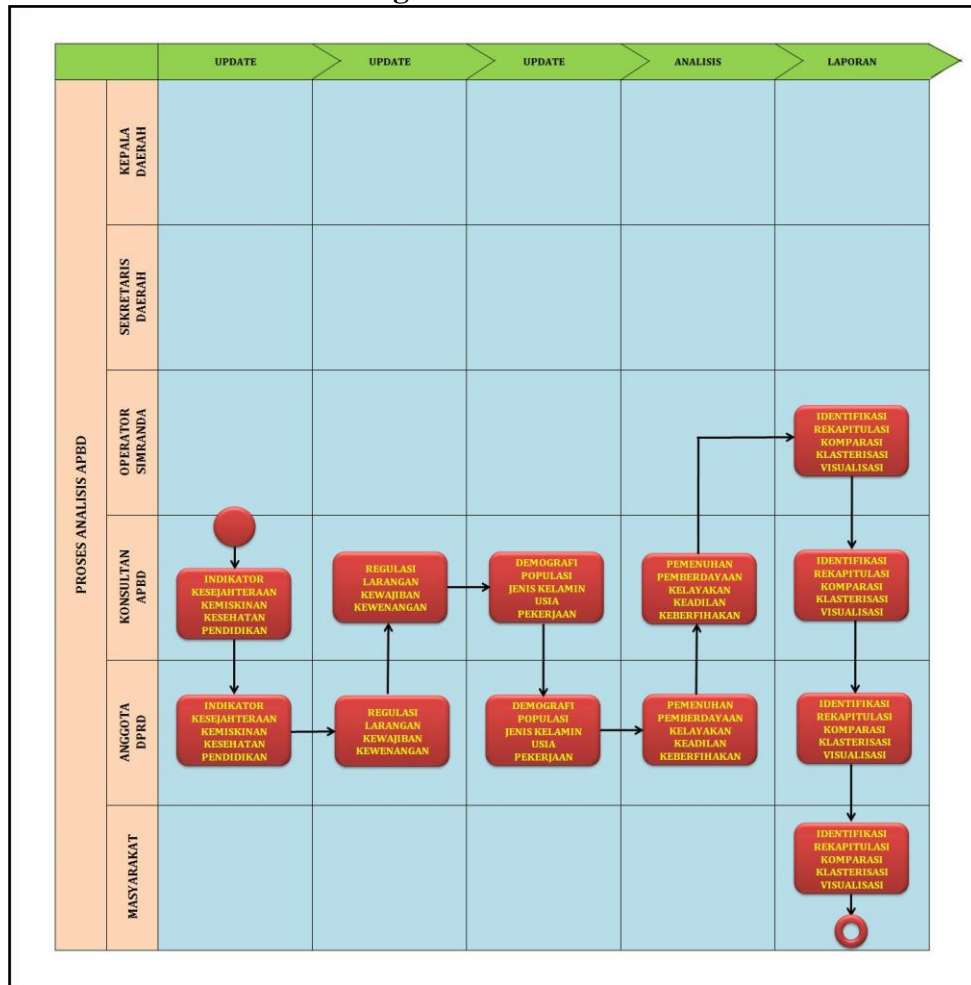
1) Pemodelan Proses Bisnis Bagian Persiapan



Gambar 5 Pemodelan Proses Bisnis Bagian Persiapan

Pada bagian ini diawali dengan adanya pengajuan pembahasan R-APBD oleh Kepala Daerah yang memerintahkan Sekertaris Daerah untuk menyusun R-APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, dalam penyusunan R-APBD ini Sekertaris Daerah memerintahkan kepada setiap kepala SKPD untuk melakukan penyusunan alokasi anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan restra SKPD. selanjutnya operator sistem informasi analisis APBD akan melakukan mengupdate nomenklatur kode organisasi, kode rekening, kode program, kode kegiatan dan dilanjutkan dengan entry, verifikasi dan validasi data anggaran APBD. Dan jika ditemukan ketidaksesuaian data anggaran, maka akan dilakukan koreksi dan revisi hingga data anggaran R-APBD sudah siap untuk dilakukan pembahasan, oleh karena itu dalam pemodelan proses bisnis ini menjadi pool persiapan dengan dengan lane yang berisikan 6 partisipan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat serta terdapat 6 milestone yang terdiri dari rancangan APBD, update sistem, entry data, verifikasi data dan koreksi data.

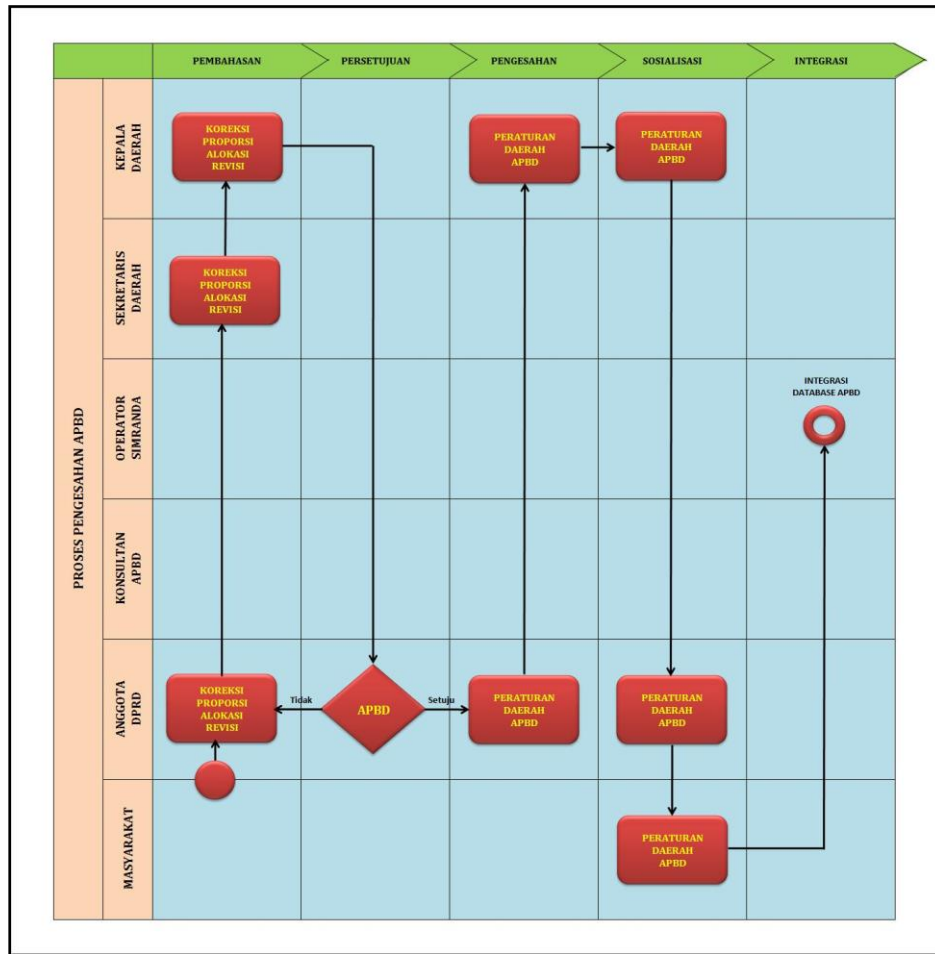
2) Pemodelan Proses Bisnis Bagian Analisis



Gambar 6 Pemodelan Proses Bisnis Bagian Analisis

Pada bagian analisis ini dimulai ketika sistem informasi analisis APBD telah selesai memfasilitasi proses digitalisasi data anggaran APBD dan selanjutnya mengolahnya menjadi informasi atau pengetahuan dalam bentuk klasterisasi ataupun perbandingan proporsi alokasi anggaran berdasarkan tahun anggaran, kode wilayah, kode organisasi, kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiayaan, kode akun program, kode akun kegiatan, kode akun rekening dan memvisualisasikannya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Dan untuk melakukan analisis anggaran daerah yang kredibel, maka konsultan APBD bersama anggota DPRD melakukan update terhadap kewenangan, kewajiban dan larangan penganggaran daerah berdasarkan regulasi proses perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku pada saat itu, serta mengupdate data-data indikator kesejahteraan daerah yang meliputi indikator kemiskinan, indikator ketenagakerjaan, indikator kesehatan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta kajian terhadap berbagai teknik analisis akuntabilitas anggaran daerah yang meliputi pemenuhan atau kepatuhan, keadilan atau kepatutan, keberfiahkan atau kemanfaatan dan pemberdayaan, oleh karena itu dalam pemodelan proses bisnis ini menjadi pool analisis dengan dengan lane yang berisikan 6 partisipan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat serta terdapat 6 milestone yang terdiri dari update indikator, update regulasi, update demografi, analisis anggaran, laporan analisis

3) Pemodelan Proses Bisnis Bagian Pengesahan



Gambar 7 Pemodelan Proses Bisnis Bagian Pengesahan

Pada bagian pengesahan adalah ketika anggota DPRD dan kepala daerah melakukan proses pembahasan, persetujuan dan pengesahan R-APBD menjadi sebuah Perda APBD. Pada bagian ini terdapat aktivitas yang cukup krusial yaitu proses pengambilan keputusan antara Kepala Daerah dan DPRD yang mengharuskan untuk melakukan uji akuntabilitas sebuah APBD. Dimana proporsi alokasi anggaran daerah ini sudah memenuhi prinsip keadilan atau kepatutan yaitu bahwa alokasi anggaran sudah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan prinsip keberfihakan atau kemanfaatan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian serta prinsip pemenuhan atau kepatuhan yang berarti belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan. Dan pada akhirnya melakukan publikasi dan sosialisasi serta operator sistem informasi mengintegrasikan data-data anggaran APBD dengan data-data anggaran APBD pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam pemodelan proses bisnis ini menjadi pool pengesahan dengan dengan lane yang berisikan 6 partisipan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat serta terdapat 6 milestone yang terdiri dari pembahasan, persetujuan, pengesahan, sosialisasi dan integrasi data APBD.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perumusan masalah, identifikasi proses bisnis dan pemetaan proses bisnis maka pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemodelan bisnis sistem informasi analisis APBD menghasilkan :

- a) 3 buah pool yaitu pool persiapan, pool analisis dan pool pengesahan dengan lane yang berisikan 6 partisipan yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, operator sistem informasi, konsultan APBD, anggota DPRD dan masyarakat.
- b) Pada pool persiapan terdapat 6 milestone yang terdiri dari rancangan APBD, update sistem, entry data, verifikasi data dan koreksi data
- c) Pada pool analisis terdapat 6 milestone yang terdiri dari update indikator, update regulasi, update demografi, analisis anggaran, laporan analisis
- d) Pada pool pengesahan terdapat 6 milestone yang terdiri dari pembahasan, persetujuan, pengesahan, sosialisasi dan integrasi data APBD.

Selanjutnya berdasarkan beberapa kesimpulan diatas., maka saran atau rekomendasi untuk rencana tindak lanjut penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan penelitian terhadap struktur APBD yang meliputi struktur data kode organisasi, kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiayaan, kode akun program, kode akun kegiatan dan kode akun rekening.
- 2) melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi sistem informasi analisis apbd dengan mengembangkan ERD (entity relationship diagram), conceptual data model (CDM) atau data model, data flow diagram (DFD) dan user interface design.
- 3) Melakukan penelitian, pengembangan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem informasi analisis APBD yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas sistem informasi analisis APBD, yang meliputi bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Assistriadi Widjiseno, ST. M.MT dilahirkan di Kota Madiun 10 Januari 1968.

Pendidikan Formal,

- 1) (S1) Teknik Mesin ITS Surabaya,
- 2) (S2) Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya
- 3) (S3) Sedang menempuh Program Doktor di Ilmu Manajemen Strategi FEB Universitas Airlangga.

Pengalaman bekerja

- 1) Tahun 2005 Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) Provinsi Jawa-Timur.
- 2) Tahun 2008 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Madiun
- 3) Tahun 2009 USAID – LGSP (United States Agency International Development - Local Governance Support Program) sebagai Technical Assistance In Strengthening Civil Society Organizations.

- 4) Tahun 2014-2015 Konsultan Individu Australia Indonesia Partnership For Decentralisation (AIPD) dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya
- 5) Tahun 2012-2016 Ketua dan Komisioner di Komisi Pelayanan Publik [KPP] Provinsi Jawa Timur.
- 6) Tahun 2016 Dosen Universitas Kahuripan Kediri.

Penghargaan

- 1) 106 Inovasi Indonesia Prospektif 2014 “Pengembangan Dan Diseminasi Sistem Informasi Anggaran Daerah (SIMRANDA) Untuk Optimasi Fungsi Anggaran DPRD” – Kementerian Riset Dan Teknologi Republik Indonesia

HKI

- 1) 2017 Jenis Ciptaan : Program Komputer, Judul Ciptaan : SIMRANDA (Sistem Informasi Anggaran Daerah)-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No : 05687 / ID EC00201706268

Organisasi

- 1) AISINDO (Association for Information Systems) Chapter Indonesia Community Member 2017.01.01

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberi dukungan **finansial** terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- [2] Presiden Republik Indonesia, 2018, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta
- [3] Presiden Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta
- [4] Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta
- [5] Presiden Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta
- [6] Alejandro Corvalan, Paulo Cox, Rodrigo Osorio, 2018, Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities, *Journal of Development Economics*, 133, pp. 1–14.
- [7] Marco Bisogno, Beatriz Cuadrado-Ballesteros, Serena Santis, Francesca Citro, 2018, Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment, *International Journal of Public Sector Management*, <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>

- [8] Rusdi Akbar, Robyn Ann Pilcher, Brian Perrin, 2015, Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure, *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 12 Issue: 1, pp.3-33.
- [9] LGSP Team, 2009, Local Governance Support Program, *Final Report*, LGSP (Local Governance Support Program), USAID (United States Agency International Development), Jakarta
- [10] LGSP Legislative Strengthening Team, 2009, Analisis APBD untuk Anggota DPRD, *Panduan*, LGSP (Local Governance Support Program), USAID (United States Agency International Development), Jakarta
- [11] LGSP Civil Society Strengthening Team, 2008, Partisipasi Organisasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran, *Panduan*, LGSP (Local Governance Support Program), USAID (United States Agency International Development), Jakarta
- [12] Solabomi Omobola Ajibolade, Collins Sankay Oboh, 2017, A Critical Examination Of Government Budgeting And Public Funds Management In Nigeria, *International Journal of Public Leadership*, Vol.13 Issue: 4, pp.218-242.
- [13] Lucie Sedmihradská, 2015, Budget Transparency in Czech Local Government, *Procedia Economics and Finance*, 25, pp 598 – 606.
- [14] Hakan Turan, Ayse Senturk, 2016, Local Government Budgeting For Gender Equality, *Procedia Economics and Finance*, 38, pp. 224 – 231.
- [15] Yuliansyah Yuliansyah & Ashfaq Ahmad Khan, 2017, A revisit of the participative budgeting and employees' self-efficacy interrelationship – empirical evidence from Indonesia's public sector, *International Review of Public Administration*, DOI:10.1080/12294659.2017.1325584.
- [16] Gissur Ó. Erlingsson, Anna Thomasson, Richard Öhrvall, 2018, Issues on Transparency, Accountability and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government, *Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services*, Volume 7, pp. 31-52.
- [17] Widjiseno, Assistriadi, 2013, Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Penentuan Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Daerah Bagi Anggota DPRD Kota/Kabupaten, *Tesis*, Program Magister Manajemen Teknologi Manajemen Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- [18] Widjiseno, Assistriadi, 2018, Design And Development Of APBD (Indonesian Local Government District Annual Budget) Information Systems Analysis Application, *International Journal Of Advanced Research In Computer Science (IJARCS)*, Volume 9, No 4, July – August ISSN : 0976-5697, Page 1- 12.
- [19] Widjiseno, Assistriadi., 2017, Penentuan Proporsi Alokasi Anggaran Pada Dokumen APBD Kota/Kabupaten Dengan Menggunakan Metode AHP, *Tecnoscienza Universitas Kahuripan Kediri*, Volume 1 No 2 April ISSN : 2541-3295, Page 25- 37
- [20] Wahyuningsih, Rutiana Dwi, And Hastjarjo, Sri, 2013, Challenges in Implementation of ICT for Budget Accountability and Development of Budget Information Literacy, *International Journal of Administrative Science & Organization*. Volume 20, Number 1.
- [21] Faisal A. Abu Rub, Ayman A. Issa, 2012, A business process modeling-based approach to investigate complex processes: Software development case study, *Business Process Management Journal*, Vol. 18 Issue: 1, pp.122-137.

- [22] Razvan Daniel Zota, Liviu Ciovica, 2015, Designing software solutions using business processes, *Procedia Economics and Finance*, 20, pp. 695 – 699.
- [23] Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)*, Jakarta
- [24] Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, Jakarta
- [25] Layna Fischer (Edt.), 2012, *BPMN 2.0 Handbook Second Edition*, Future Strategies, Lighthouse Point, Florida, USA
- [26] Ricardo Pérez-Castillo ,María Fernández-Ropero, Mario Piattini, 2019, Business process model refactoring applying IBUPROFEN. An industrial evaluation, *The Journal of Systems and Software*, 147, pp. 86–103.
- [27] Brane Kalpič, Peter Bernus, 2006, Business process modeling through the knowledge management perspective, *Journal of Knowledge Management*, Vol 10 Issue 3, pp.40-56.